

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang disimpulkan bahwa :

1. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan, baik pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun pada Kitab Undang-Undang Hukum pidana sudah melindungi anak dalam tindak pidana baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Pada Undang-undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 69A tertera perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual seperti, edukasi tentang kesehatan reproduksi, dijelaskan mengenai nilai agama dan kesusilaan, rehabilitasi social, pendampingan oleh psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 59A terdapat perlindungan khusus bagi anak yang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu penanganan yang secepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dikatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” dengan ini Kitab Undang-Undang sudah dengan jelas melindungi korban pemerkosaan yang baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah memberi perlindungan terhadap anak, dan sudah terdapat asas Lex specialis derogat legi generali dalam penerapannya. Hanya saja di dalam undang-undang tersebut dikatakan anak yang mengalami “pelecehan seksual” sementara dalam Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 dikatakan orang yang mengalami bersetubuh di luar nikah atau ancaman perkosaan, jelas bahwa dalam Pasal 285 KUHP ini ada kata “perkosaan”. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 59A juga

sudah terdapat bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang sudah diatur secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang tepat. Hanya saja dalam penerapan ketentuan tersebut ada kendalanya. Ancaman yang diberikan juga sudah jelas bahwa dalam pasal 285 KUHP diancam 12 tahun penjara dan dalam **Pasal 81 ayat (1)** undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Kendala yang dialami Hukum Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan seperti, adanya saksi anak yang tahu dan melihat tetapi tidak mau memberikan kesaksian. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa saksi dan korban, berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas

baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau Mendapat pendampingan. Dalam pasal ini sudah jelas tetapi masih terjadi kendala seperti saksi tidak mau memberi kesaksian, ada juga keluarga korban yang tidak membiarkan anaknya untuk memberikan kesaksian karena tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tersebut. Kendala juga terjadi saat korban tidak bisa memberikan kesaksian dikarenakan mengalami trauma, maka pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak akan di rehabilitasi dan diberi pendampingan oleh psikososial dari pengobatan hingga pemulihan.

## **B. Saran**

Menurut penulis dari permasalahan yang ada maka diperlukan:

1. Pengaturang dalam Undang-Undang Nomor Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus menjelaskan dan mengatur secara spesifik kejahatan seksual apa saja yang bisa menimpa anak dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 diperlukan pengaturan lebih

lanjut mengenai detail hukuman, sanksi maupun mungkin denda yang harus ditanggung serta pengaturnya juga seharusnya dibuat untuk setiap anak dan tidak hanya wanita saja.

2. Edukasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus lebih disebar luaskan lagi agar masyarakat lebih paham dan mengerti, sehingga apabila ada kasus yang menimpa anaknya atau anak sebagai orang yang melihat dan tau kejadian tersebut dapat memberi kesaksian tanpa perlu merasa takut.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdi M. Arief Mansur, 2003, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.

Frans Maramis, 2016, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Indonesia, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, 2007, Jakarta.

Lamintang A.F, 2011, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, cetakan ke empat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lamintang P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudaryono, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUUKUHP*, Natangsa Surbakti, Surakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

#### **JURNAL/MAKALAH**

Muhammad Fachri Said, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.4.

Sania Mashabi, 2020, “Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Kementrian PPPA*.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Kitab undang-undnag hukum pidana

#### INTERNET

*Rega Maradewa*, KPAI Desak Para Pelaku Pemerksaan Remaja di Tangerang Disanksi Berat, hlm.1, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-desak-para-pelaku-pemerksaan-remaja-di-tangerang-disanksi-berat> , diakses 27 Februari 2021 pukul 10.00 WIB

